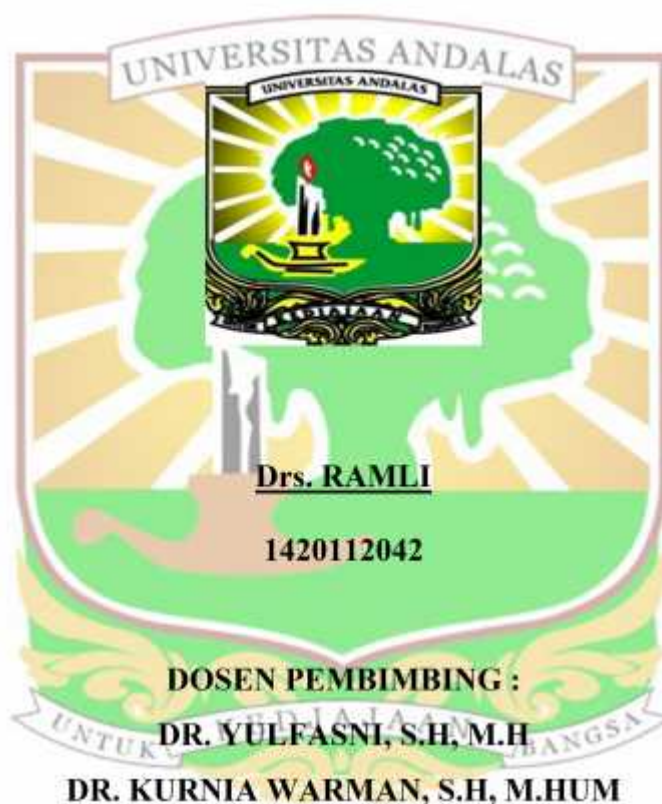


**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI  
MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TALU PASAMAN BARAT  
(STUDI PERKARA NOMOR 0130/PDT.G/2013 PA TALU)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2016**

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MELALUI  
MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA TALU PASAMAN BARAT  
(STUDI PERKARA NOMOR 0130/PDT.G/2013 PA TALU)**

**ABSTRAK**

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang diamanatkan undang-undang peradilan agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Perkara Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA Talu merupakan produk Pengadilan Agama Talu yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat memohonkan eksekusi terhadap isi putusan yang ternyata saat *aanmaning* dilaksanakan, diketahui bahwa 2 hari setelah putusan dibacakan, Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan yang isinya berbeda dengan amar putusan. Saat *aamaning* dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membicarakan permohonan eksekusinya dengan baik-baik yang diakomodasi oleh Pengadilan Agama Talu dengan proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Proses eksekusi putusan hakim tentang pembagian harta bersama pada PA Talu Pasaman Barat, 2) Proses mediasi terhadap permohonan eksekusi dan 3) Kekuatan hukum terhadap hasil mediasi yang dilakukan terhadap permohonan eksekusi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pengadilan Agama Talu. Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Talu serta Mediator yang ditunjuk untuk memimpin proses mediasi dan data sekunder diperoleh dari penelitian bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari undang-undang dan bahan hukum lain yang berkaitan. Data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis isi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Talu sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dengan catatan putusan yang dapat dimohonkan eksekusi sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan dengan sukarela dan isi putusan mengandung amar *condemnatoir*, 2) Bahwa pada dasarnya proses mediasi yang dilakukan terhadap permohonan eksekusi sama dengan proses mediasi yang dilakukan saat perkara masih berjalan meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengakomodasi adanya proses mediasi terhadap permohonan eksekusi dan 3) Kekuatan hukum hasil damai dari proses mediasi sama dengan kekuatan hukum perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Kata kunci: Eksekusi Putusan Hakim, Sengketa Harta Bersama, Pengadilan Agama dan Mediasi Terhadap Eksekusi.

**EXECUTION OF RELIGIOUS COURT JUDGE DECISION ON  
DISTRIBUTION OF COLLECTIVE PROPERTY DUE TO  
DIVORCE THROUGH MEDIATION AT THE RELIGIOUS  
COURTS OF TALU PASAMAN BARAT  
(A CASE STUDY NUMBER 0130/ PDT.G/ 2013/ PA TALU)**

**ABSTRACT**

Religious Court is one of the judicial parties under the Supreme Court. One of its jurisdictions mandated by law is receiving, investigating and adjudicating collective property claim. A case Number 0130 / Pdt.G / 2013 / PA Talu is a product of the Religious Court which have been legally binding. A plaintiff invoked the execution of the decision when *aanmaning* is currently implemented. It was known that two days after the verdict was read, Plaintiffs and Defendants made a different letter of agreement with the ruling. When *aanmaning* was implemented, Plaintiff and Defendant agreed to discuss the request for execution favorably accommodated by the Religious Court of Talu through mediation process to reach a peaceful agreement. The problems in this thesis are: 1) The execution process of the judge's decision on the distribution of collective property at Religious Court of Talu Pasaman Barat, 2) The mediation process of requests for execution and 3) The legal force of the mediation results conducted on the petition. Method of the research employed empirical juridical which is located in the Religious Court of Talu. The primary data was obtained through interviews with the chairman, clerk, and mediator appointed to lead the mediation process in the court. Secondary data was obtained from literature research consisting of laws and other related legal materials. The data was analyzed by descriptive analysis techniques and content analysis. From the research, the researcher found the answer to the problems as follows: 1) the execution at Religious Court of Talu is in accordance with legal procedures applied in Religious Court with notes that may be filed, the execution has been already legally binding, it is not executed voluntarily and the decision contains amar *condemnatoir*, 2) basically mediation process conducted on the petition is similar with the mediation process done while the case is still running even though the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on procedures for mediation in the court does not accommodate the mediation process on the petition execution and 3) The legal force on a peaceful agreement of the mediation process is equal to the force of law agreement in accordance with the provision 1338 of the Civil Code.

Keywords: Execution of Judge Decision, Collective property Dispute, The Religious Court and Mediation against Execution.